

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN DI TANAH PESISIR PANTAI SOLONG BERDASARKAN PERDA NO. 9 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

**Rizky Arief Meilana<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email:balehopongo@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Indonesia's diverse cultural, flora and fauna natural resources are a potential for the State to carry out national development, which is used by several parties on the Solong coast to construct buildings. Departing from these problems, the authors take the formulation of the problem of how the licensing and erection of villa / hotel buildings and how efforts to complete the construction of buildings on the coast of Solong which violate Local Regulation number 9 of 2014. The research method used is empirical juridical. The data obtained were then analyzed by descriptive method, then the juridical provisions regarding the default in the musyarakah agreement using the inductive thinking method. From the conclusions that the building permit process must be in accordance with the provisions of the applicable regulations and efforts for buildings that violate the rules is to provide administrative and criminal sanctions.*

**Keywords :** *Protection, Development, Borderline*

### **ABSTRAK**

Sumberdaya alam keanekaragaman budaya, flora dan fauna yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah potensi bagi Negara untuk melakukan pembangunan nasional, hal ini yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak di pesisir pantai solong untuk mendirikan bangunan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah proses perizinan dan pendirian bangunan villa/ hotel dan bagaimana upaya penyelesaian pembangunan gedung di tepi pantai solong yang menyalahi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, kemudian ketentuan yuridis mengenai terjadinya wanprestasi dalam perjanjian musyarakah tersebut menggunakan metode berpikir induktif. Dari hasil kesimpulan bahwa proses perizinan bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan upaya untuk bangunan yang menyalahi aturan adalah memberikan sanksi baik berupa administratif maupun sanksi pidana.

**Kata Kunci :** Perlindungan,Pembangunan,Batas Sempadan.

### **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan indonesia merupakan Negara dengan deretan pulau pulau yang termasuk dalam suatu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kesatuan, sehingga membentuk sebuah Negara kepulauan. Pulau pulau tersebut terbagi menjadi daerah yang menghasilkan potensi yang beragam. Kondisi geografis yang beragam membangun ciri khas dari masing masing daerah di berbagai penjuru nusantara. Sumberdaya alam keanekaragam budaya, flora dan fauna yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah potensi bagi Negara untuk melakukan pembangunan nasional sebagai Negara yang memiliki sejumlah pulau disepanjang wilayah Indonesia.

Pantai adalah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Pantai memiliki keanekaragaman hayati dan fungsi sosiasl Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, yang menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dan di kelilingi garis pantai sepanjang 99.093 km. Terpanjang nomor 2 setelah kanada, namun kawasan pantai kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan , perubahan yang di sebabkan alam maupun tingkah laku manusia itu sendiri ,maka dari itu sangat diperlukan adanya sempadan pantai, kawasan ini berfungsi mencegah lebih jauh seperti mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian pantai. bagi masyarakat pesisir pantai, hal yang salah apabila tanah di kawasan pantai dipergunakan atau tidak dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, terlebih apabila tanah tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dan masyarakat,kemanfaatan tanah di kawaasan pantai dan pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kegunaan serta sifat hak dari tanah tersebut, sehingga mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

Pembangunan dapat berupa penyelenggaraan bangunan gedung, bangunan gedung dapat dilaksanakan di atas tanah dan daerah- daerah khusus seperti pendirian gedung di tepi sungai, pantai yang memiliki persyaratan teknis dan administratif dalam pelaksanaanya<sup>2</sup> Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka menginspirasi penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan rumusan masalah bagaimanakah proses perizinan dan pendirian bangunan villa/ hotel di pesisir pantai solong?, bagaimanakah upaya penyelesaian pembangunan gedung di tepi pantai solong yang menyalahi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perizinan dan pendirian bangunan gedung berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang bangunan

---

<sup>2</sup> Melalui <https://www.hukumproperti.com/pengetahuan-hukum-properti/persyaratan-teknis-dan-administratif-bangunan-gedung/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019. Pukul 9.54 WIB.

gedung, terhadap bangunan yang ada di tepi pantai dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa bangunan gedung yang menyalahi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Pendirian Bangunan di Pesisir Pantai Solong**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung mengatur tentang bagaimana sebuah prasyarat sebuah bangunan gedung dapat berdiri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Prasyarat yang harus di penuhi yakni syarat administratif dan syarat teknis. Sebagai wilayah hukum Indonesia, segala kegiatan hukum yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok yang melibatkan suatu bentuk pengakuan hak, haruslah didasari oleh sebuah bukti yang sah dan kuat.<sup>4</sup> Pembangunan bangunan gedung yang dilaksanakan diatas sebuah tanah termasuk sebuah kegiatan hukum yang memerlukan perizinan dan pembuktian apakah seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan hukum tersebut dalam hal ini adalah mendirikan sebuah bangunan gedung. Pendirian bangunan gedung yang didirikan di atas tanah di tepi pantai Banyuwangi memiliki pengaturan yang sama dalam prasyarat pendiriannya, namun terdapat pengaturan garis sempadan pantai sebagai batas minimum diperkenalkannya sebuah bangunan untuk berdiri termasuk batas maya dari garis pantai dengan sebuah bangunan.

Adapun Jangka waktu pelayanan mendirikan bangunan:

1. Jangka waktu pelayanan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 7 (Tujuh) hari kerja, setelah disahkannya gambar konstruksi oleh Dinas Teknis (berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap);
2. Apabila masih ada kekurangan/tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon;
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan.

**Tabel 1**  
**Tentang Persyaratan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan**  
**(Tinjau Lokasi)**

Uraian	Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan	- Mengisi blangko permohonan: - Pernyataan kesanggupan

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, , h. 229.

<sup>4</sup> Eko Yulian Insur. 2012. “ *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan tanah*”, Yogyakarta; Pustaka Yustisia. h.8.

Uraian	Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan tetangga (batas bangunan)</li> <li>- Persetujuan dari pemilikan tanah</li> <li>- Fotokopi KTP yang masih berlaku;</li> <li>- Fotokopi NPWP;</li> <li>- Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;</li> <li>- Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;</li> <li>- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha)</li> <li>- Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);</li> <li>- Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/PPT (luas usaha &gt; 500 m<sup>2</sup>);</li> <li>- Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL (untuk bangunan yang menimbulkan gangguan)</li> <li>- Fotokopi pengesahan Rencana Tapak Tanah/<i>Site Plan</i> (untuk perumahan);</li> <li>- Surat pernyataan pengelolaan makam mengetahui pengurus kematian/Kepala Desa/lurah setempat (untuk perumahan);</li> <li>- Gambar detail bangunan;</li> <li>- Perhitungan konstruksi (untuk bangunan</li> <li>- Penelitian tanah/sondir;</li> <li>- Gambar denah lokasi;</li> <li>- Surat kuasa bermatrai (permohonan izin selain pemilik)</li> </ul>

Sumber : Diambil dari peraturan Izin Mendirikan Bangunan (Tinjau Lokasi) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

**Tabel 2**  
**Tentang Persyaratan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan**  
**(Non Tinjau Lokasi)**

Uraian	Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi blanko permohonan :</li> <li>- Pernyataan Kesanggupan.</li> <li>- Persetujuan Tetangga (batas bangunan).</li> <li>- Persetujuan dari Pemilikan Tanah.</li> <li>- Fotokopi KTP yang masih berlaki;</li> <li>- Fotokopi NPWP;</li> <li>- Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;</li> <li>- Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;</li> <li>- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);</li> <li>- Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);</li> <li>- Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT (luas usaha &gt; 500 m<sup>2</sup>);</li> <li>- Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL (untuk bangunan yang menimbulkan gangguan);</li> <li>- Fotokopi Pengesahan Rencana Tapak Tanah/<i>Site Plan</i> (untuk perumahan);</li> </ul>

Uraian	Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pernyataan Pengelolaan Makam mengetahui pengurus kematian/Kepala Desa/Lurah setempat (untuk perumahan);</li><li>- Gambar detail bangunan;</li><li>- Perhitungan konstruksi (untuk bangunan bentang &gt; 8 m dan gedung bertingkat);</li><li>- Penelitian tanah/sondir (untuk bangunan &gt; 2 lantai);</li><li>- Gambar denah lokasi;</li><li>- Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).</li></ul>

Sumber : Diambil dari peraturan Izin Mendirikan Bangunan (Non Tinjau Lokasi) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

### **Upaya Penyelesaian Pembangunan Gedung di Tepi Pantai Solong yang Menyalahi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014**

Upaya penyelesaian pembangunan yang menyalahi atau tidak sesuai dengan peraturan adalah dengan memberikan sanksi, baik berupa administrasi maupun pidana.

#### **Sanksi Administrasi Tahap Pembangunan**

Subjek hukum yang melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahap pembangunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan; Pasal 9 ayat (3) Perda Kabupaten Banyuwangi No 9 Tahun 2014, bahwa subjek hukum harus melakukan perubahan persyaratan administrasi dan teknis bagi bangunan gedung yang memiliki fungsi dan atau klasifikasi yang berubah dari fungsi dan atau klasifikasi yang pertama; Pasal 18 ayat (1) dan (2) yakni penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan sesuai dengan RTRW, RDTR dan atau RTBL kabupaten Banyuwangi dan melakukan kesesuaian terhadap undang-undang dan persetujuan pertimbangan dari pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang dilaksanakan diatas atau dibawah sarana prasarana umum, dibawah atau diatas air, di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dan daerah dengan potensi rawan bencana alam; Pasal 20 ayat (1) bahwa bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi kesesuaian intensitas bangunan gedung dengan persyaratan ketinggian kepadatan dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan perturan RTRW, RDTL dan atau RTBL; Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4) yakni pengaturan tentang bangunan bertingkat; Pasal 97 ayat (2) tentang pelaksanaan kontruksi yang wajib mendapat kelaikan fungsi bangunan yang meliputi pemeriksaan kesesuaian, fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan memiliki IMB; Pasal 108 ayat (3) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berupa pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan

penggantian bahan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus dilengkapi dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>5</sup>

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis akan di berikan kepada para pihak sebanyak tiga kali, dengan tenggang waktu tujuh hari. Apabila dalam masa tenggang yang telah diberikan oleh pemerintah daerah tidak dilakukan itikad baik berupa pemenuhan persyaratan, maka bangunan gedung tersebut akan dikenakan sanksi administrasi kedua berupa pembatasan kegiatan bangunan gedung. Setelah 14 (empat belas hari) sejak masa sanksi berupa pembatasan kegiatan. Jika bangunan gedung dilaksanakan tetap tidak terjadi perbaikan terhadap persyaratan yang ada maka akan dilakukan sebuah penghentian sementara bangunan gedung dan pembekuan IMB, dan dilanjutkan sanksi berupa penghentian tetap bangunan gedung, pencabutan izin IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

### **Sanksi Administrasi pada Tahap Pemanfaatan**

Sanksi administrasi pada tahap pemanfaatan diberlakukan terhadap pelanggaran dengan ketentuan Perda Kabupaten Banyuwangi No 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa subjek hukum harus melakukan perubahan persyaratan administrasi dan teknis bagi bangunan gedung yang memiliki fungsi dan atau klasifikasi yang berubah dari fungsi dan atau klasifikasi yang pertama; Pasal 19 ayat (1) bahwa fungsi bangunan gedung harus selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perubahan RTRW, RDTR, dan RTBL yang bersangkutan dengan perubahan peruntukan lokasi; Pasal 107 menjelaskan beberapa poin yang harus diikuti oleh pemilik bangunan gedung, bahwa bangunan gedung harus dijalankan sesuai dengan kegiatan pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan apa yang tercantum didalam IMB dan dilakukan secara tertib administrasi dan teknis dan terjamin seluruh kelaikan fungsi bangunan gedung sehingga tidak menimbulkan kerugian diwaktu yang akan datang terhadap lingkungan. Selama tahap pemanfaatan, pemilik bangunan gedung wajib mengikuti program pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung; Pasal 109 ayat (2) bahwa dalam menggunakan jasa perawatan bangunan gedung oleh pihak lain harus memiliki izin sertifikat yang sesuai dengan dasar perundnag-undangan tentang jasa kontruksi; Pasal 114 ayat (3) bahwa dalam usulan penetapan bangunan gedung harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian bangunan gedung, kemudian mendapatkan persetujuan dari masyarakat melalui rapat dengar masyarakat; Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4) mengatur tentang penetapan pembongkaran bangunan gedung yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil identifikasi dari pemerintah

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 46 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014

daerah dan atau dari laporan masyarakat atas bangunan-bangunan tidak laik fungsi yang tidak dapat diperbaiki, Bangunan gedung yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat, TAP MPR Nomor IX/MPR Tahun 2001 secara formal menegaskan perlunya terus dikembangkan penataan penguasaan tanah secara nasional sehingga pemanfaatannya dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta pencegahan penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan pembangunan bangunan gedung<sup>6</sup> tanpa IMB, bangunan yang akan di ubah tampilanya oleh pemilik bangunan gedung.

Hasil identifikasi akan diberikan kepada pemilik bangunan gedung dan wajib melakukan pengkajian teknis. Bagi permasalahan bangunan yang telah berdiri selama beberapa tahun sebelum ditetapkannya Perda Kabupaten Banyuwangi No 19 Tahun 2014 tentang Bangunan gedung, merupakan bangunan gedung tahap pemanfaatan, dalam hal ini harus memenuhi segala ketentuan dari pemerintah daerah. Terkhusus bagi bangunan yang berdiri di daerah rawan abrasi, ditepi pantai kurang dari 100 meter dari sepadan pantai, dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung, maka tindakan peringatan tertulis kepada pemilik akan dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut selama 21 hari, apabila pemilik bangunan gedung masih belum melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran maka akan dilakukan pemberhentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan sertifikat laik fungsi Pemerintah daerah masih memberikan tenggat waktu dari dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 30 hari, apabila masih belum dilaksanakan perbaikan, maka sanksi selanjutnya adalah penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan sertifikat lain fungsi. Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung Perintah pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan apabila 14 hari dari masa sanksi pembatasan kegiatan bangunan gedung dilakukan namun pemilik bangunan gedung masih tetap mengabaikan sanksi yang diberikan. Pembongkaran atas bangunan gedung tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya yang ditanggung oleh pemilik bangunan gedung, kecuali pemilik bangunan gedung yang tidak mampu, maka biaya pembongkaran akan dibebankan oleh pemerintah daerah. Apabila telah mencapai tahap pembongkaran ini, maka pemilik bangunan gedungakan dikenakan denda administrasi sebesar sepuluh persen dari total bangunan gedung yang dibongkar dengan jumlah yang disesuaikan dengan seberpaa berat pelanggaran yang dilaksanakan oleh subjek hukum atas bangunan gedungnya.

---

<sup>6</sup> Muhibbin, Implementasi Hukum Penataan Ruang Dalam Prespektif Peran Serta Masyarakat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, 26, Maret 2007, h. 76.

Khusus untuk bangunan gedung yang pada saat tahap pembangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, akan dikenakan sanksi penghentian sementara hingga Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan. Namun untuk bangunan gedung yang telah berdiri dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka secara langsung akan dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Sehingga untuk bangunan gedung yang berdiri secara permanen di tepian pantai di wilayah Banyuwangi, akan dapat dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran oleh pemerintah daerah.

### **Sanksi Pidana**

Tindak pidana terhadap bangunan gedung, berdasarkan ketentuan Perda Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 merupakan sebuah pelanggaran. Sanksi pidana diberikan kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan; Pasal 45 bahwa sebuah bangunan gedung yang berdiri harus memperhatikan persyaratan keselamatan bangunan gedung berupa keandalan bangunan gedung. Prasyarat keselamatan yang dimaksud meliputi kemampuan sebuah bangunan gedung terhadap suatu beban msuatan, bahaya kebakaran dan terhadap bahaya petir; Pasal 46 ayat (1) sampai ayat (10) bahwa prasyarat kemampuan bangunan gedung untuk sebuah beban muatan harus memperhatikan persyaratan struktur bangunan, pembebanan pada bangunan, struktur atas bangunan, struktur bawah bangunan, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur, hingga persyaratan bahan bangunan; Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (8) bahwa bangunan gedung dalam persayratan keandalannya, perlu juga memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; Pasal 48 ayat (1) sampai ayat (3) bahwa bangunan gedung harus memenhi persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan kelistrikan yang berupa persyaratan instalasi proteksi petir dan sistem kelistrikan; Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (6) bahwa bangunan gedung untuk kepentingan umum wajib dilengkapi sebuah sistem pengamanan yang memadai agar terhindar dari hal yang mengancam keselamatan penghuni gedung dan harta benda didalamnya bagi subjek hukum yang tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut diatas, akan dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Proses perizinan mendirikan bangunan gedung bisa dilihat pada halaman 34 pada pasal 6 sampai pasal 13 mengenai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2014
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas bangunan gedung yang bersifat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan umum ditahap perencanaan,



pelaksanaan, dan atau pemantauan dapat diajukan gugatan oleh masyarakat kepada lembaga pengadilan yang berwenang. Dan sanksi yang diberikan terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan bangunan gedung meliputi :

- a. Sanksi Administrasi Tahap Pembangunan
- b. Sanksi Administrasi pada Tahap Pemanfaatan
- c. Sanksi Pidana.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perlindungan hukum pembangunan di tanah pesisir pantai solong, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Daerah harus berkomitmen dalam peningkatan pelayanan pemberian IMB Dan pengendalian tata ruang Kota Banyuwangi dalam bentuk kebijakan. DPMPTSP Banyuwangi hendaknya berhati-hati dalam pemberian izin untuk fungsi usaha yang justru merugikan daripada manfaat yang diperoleh.
2. Hendaknya DPMPTSP Banyuwangi mensosialisasikan tentang IMB lagi agar masyarakat mengetahui pentingnya IMB dalam pembangunan untuk ditingkatkan lagi. Selain itu sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan warga dalam mengurus IMB sehingga sifat abai masyarakat dapat dikurangi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditingkatkan lagi dan tidak berhenti pada tahap program tahunan namun harus benar-benar menyentuh kesadaran warga pada tingkat RT/RW.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Eko Yulian Insur. 2012. “ *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan tanah*”. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

Suratman dan Philips Dillah, 2015.*Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, , h. 229.

#### **Jurnal**

Muhibbin, Implementasi Hukum Penataan Ruang Dalam Prespektif Peran Serta Masyarakat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, 26, Maret 2007.